



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia dalam Intervensi
Militer di Perang Sipil Suriah**

Skripsi

Oleh

Redford Justin

6091801208

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia dalam Intervensi
Militer di Perang Sipil Suriah**

Skripsi

Oleh

Redford Justin

6091801208

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., Msi

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

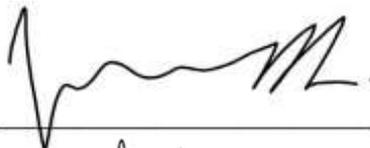


Tanda Pengesahan Skripsi

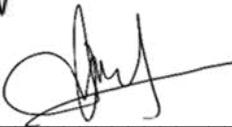
Nama : Redford Justin
Nomor Pokok : 6091801208
Judul : Analisis Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia dalam Intervensi Militer di Perang Sipil Suriah

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 05 Juli 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A

: 

Sekretaris
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Anggota
Vrameswari Omega Wati, S.I.P., M.Si (Han)

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redford Justin
Nomor Pokok : 6091801208
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Analisis Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia
dalam Intervensi Militer di Perang Sipil Suriah

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 13 Juni 2022



Redford Justin

6091801208

ABSTRAK

Nama : Redford Justin

NPM : 6091801208

Judul : Analisis Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia dalam Intervensi Militer di
Perang Sipil Suriah

Setelah memberikan dukungan politik dan bantuan militer dalam jumlah yang besar terhadap pemerintahan Suriah dari tahun 2011, Rusia akhirnya memutuskan untuk melakukan intervensi militer di perang sipil Suriah pada tahun 2015 dan mengubah haluan perang sipil yang lebih menguntungkan bagi pemerintah Suriah dan Rusia. Konsep yang digunakan sebagai dasar penelitian ini adalah konsep kebijakan luar negeri, konsep intervensi, dan konflik internal yang kemudian akan dibantu oleh kerangka teori realisme untuk membantu menjelaskan kebijakan luar negeri Rusia beserta kepentingan nasionalnya di Suriah yang menaungi pertimbangan domestik dan internasional Rusia sehingga mengakibatkan Rusia untuk melakukan intervensi militer di Suriah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan dilakukan melalui studi pustaka. Penelitian ini akan berfokus pada tahun 2015 dimana Rusia secara resmi melakukan intervensi militer hingga tahun 2021 dimana setelah kemajuan yang didapati setelah hampir lima tahun Rusia mengalami kemunduran progres pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, didapatkan beberapa temuan yaitu pertimbangan domestik Rusia dalam melakukan intervensi militer adalah untuk mencegah pengaruh terorisme untuk berkembang di Rusia, dan Rusia memiliki kepentingan nasional dalam sektor militer, ekonomi, dan politik dalam proses melakukan intervensi militernya di Suriah. Sementara, pertimbangan internasional Rusia terdapat dalam keinginan Rusia untuk tetap mempertahankan status relevansinya dalam kawasan Timur Tengah dan dunia internasional. Rusia ingin menggunakan intervensi militer ini untuk menjadikan Suriah sebagai sekutunya yang setia sembari meningkatkan hubungan Rusia terhadap negara - negara di kawasan Timur Tengah secara ekstensif.

Kata Kunci: Suriah, Konflik Internal, Kebijakan Luar Negeri, Intervensi, Perang Sipil, Realism

ABSTRACT

Name : Redford Justin

NPM : 6091801208

*Title : Analysis of the Foreign Policy of the Russian Federation in Military
Intervention in the Syrian Civil War*

After providing large amounts of political support and military assistance to the Syrian government from 2011, Russia decided to intervene militarily in the Syrian civil war in 2015 and turn the course of the civil war in a more favorable direction for the Syrian government and Russia. The concepts used as the basis of this research are the concept of foreign policy, the concept of intervention, and internal conflict which will then be assisted by a realism theoretical framework to help explain Russia's foreign policy and its national interests in Syria which threaten Russia's domestic and international interests, causing Russia to military intervention in Syria. The research method that will be used in this research is a qualitative method which will be carried out through a literature study. This research will focus on 2015 when Russia officially intervened in the military until 2021 where after intervening for almost five years Russia experienced a setback in 2021. In this study, several findings were obtained, namely the domestic considerations of Russia's considerations in conducting military intervention, namely: to prevent the influence of terrorism from developing in Russia, and Russia has national interests in the military, economic and political sectors in the process of conducting its military intervention in Syria. Meanwhile, Russia's international considerations lie in Russia's desire to maintain its status of relevance in the Middle East region and internationally. Russia wants to use this military intervention to make Syria a staunch ally while enhancing Russia's relations with the country in the Middle East region extensively.

Keywords: Syria, Internal Conflict, Foreign Policy, Intervention, Civil War

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia dan perlindungannya yang telah diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini yang berjudul **Analisis Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia dalam Intervensi Militer di Perang Sipil Suriah**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Rusia menggunakan kepentingan nasionalnya dalam ranah domestik dan internasional untuk melakukan intervensi militer di perang sipil Suriah pada tahun 2015 - 2021.

Penelitian ini disusun oleh penulis untuk memenuhi syarat kelulusan program sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangannya, penulis siap menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang akan membaca.

Jakarta, 08 Juni 2022



Redford Justin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1 Metode Penelitian	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	23
1.7 Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
INTERVENSI MILITER FEDERASI RUSIA DI PERANG SIPIL SURIAH	26
2.1 Perang Sipil Suriah	27
2.2 Kerjasama antar Federasi Rusia dan Suriah dalam Bidang Militer dan Ekonomi	29
2.2.1 Kerjasama dalam bidang Militer	29
2.2.1 Kerjasama dalam bidang Ekonomi	31

2.3 Keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil Suriah Sebelum Melakukan Intervensi Militer	33
2.3.1 - Dukungan Politik	33
2.3.2 - Bantuan Militer	36
2.4 - Intervensi Militer Federasi Rusia di Perang Sipil Suriah	38
2.4.1 - Permintaan Resmi dari Pemerintah Suriah	38
2.4.2 - Pelaksanaan Intervensi Militer di Suriah oleh Rusia	40
2.4.3 - Situasi Suriah pada tahun 2021	43
BAB III	46
INTERVENSI MILITER SEBAGAI PEMENUHAN KEPENTINGAN DOMESTIK DAN INTERNASIONAL FEDERASI RUSIA	46
3.1 Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia	47
3.1.1 - Transisi Setelah Perang Dingin	67
3.1.2 - Doktrin Primakov	48
3.1.3 - Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia di bawah Vladimir Putin	51
3.2 Orientasi Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia di Suriah	55
3.2.1 - Poros Kebijakan Luar Negeri Rusia di Kawasan Timur Tengah	55
3.2.2 - Proyeksi <i>Soft Power</i> Federasi Rusia dalam Proses Intervensi di Suriah	58
3.2.3 - Penggunaan Intervensi Militer di Suriah sebagai Proyeksi Hard Power di Dunia Internasional	61
3.2.4 - Kepentingan Nasional Jangka Pendek Rusia dalam Intervensi Militer di Suriah	65
3.2.5 - Kepentingan Nasional Jangka Panjang Rusia dalam Intervensi Militer di Suriah	66
3.3 Pemenuhan Kepentingan Domestik Federasi Rusia dalam Melakukan Intervensi Militer di Perang Sipil Suriah	69
3.3.1 - Menjaga Keamanan Nasional Rusia dari Kelompok Ekstrimis di Suriah	69
3.3.2 - Menjaga Kepentingan Nasional Rusia di Suriah	71
3.3.2.1 - Proyek Rekonstruksi Sumber Daya Minyak dan Gas	71
3.3.2.2 - Penjualan Persenjataan	74
3.4 - Pemenuhan Kepentingan Internasional Federasi Rusia dalam Melakukan Intervensi Militer di Perang Sipil Suriah	78
3.4.1 - Suriah Sebagai Sekutu di Kawasan Timur Tengah	78
3.4.2 - Legitimasi Kehadiran Rusia di Kawasan Timur Tengah sebagai Kekuatan Regional	79
BAB IV	83
KESIMPULAN	83
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kendali Pemerintah Suriah pada Januari 15, 2015

Gambar 2.2 Peta Kendali Pemerintah Suriah pada akhir tahun 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Penjualan Ekspor Persenjataan Rusia ke Suriah tahun 2011 - 2019

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Statistika Negara Pengekspor Persenjataan Terbesar tahun 1990 - 1994, 2000 - 2004, 2010 - 2014

DAFTAR SINGKATAN

BRICS	: Brazil, Russia, India, China (PRC), and South Africa.
CIS	: Commonwealth of Independent States
FSA	: Free Syrian Army
ICC	: International Criminal Court
IRGC	: Islamic Revolutionary Guard Corps
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MIGAS	: Minyak dan Gas
MOU	: Memorandum of Understanding
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NLF	: National Front for Liberation
P5+1	: Lima Anggota Permanen Dewan Keamanan PBB + Jerman
PDB	: Produk Domestik Bruto
PBB	: Perserikatan Bangsa - Bangsa
SDF	: Syrian Democratic Forces
SNA	: Syrian National Army
YPG	: Yekîneyên Parastina Gel (People's Defense Units)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak keruntuhan Uni - Soviet pada tahun 1991, Rusia meninggalkan kawasan Timur Tengah untuk memfokuskan terhadap permasalahan domestik yang dialami Rusia pada masa itu, selain itu Rusia dalam pemerintahan Boris Yeltsin lebih mengutamakan untuk melakukan hubungan dengan negara - negara Barat.¹ Terlebih dari itu, Rusia juga ingin mempertahankan pengaruhnya di wilayah bekas Uni - Soviet, beberapa revolusi warna juga berhasil menjatuhkan pemerintahan - pemerintahan di negara bekas Uni - Soviet yang sebelumnya setia dengan pemerintahan Rusia.² Kebijakan luar negeri Rusia pun juga berbeda dari negara pendahulunya, dalam beberapa hal terutama Rusia berusaha untuk mengembalikan kembali posisinya sebagai negara berpengaruh di dunia dan tahun - tahun awal setelah Uni - Soviet runtuh tidak membantu keinginan mereka. Dalam rangka menguatkan kembali status kekuatan dan pengaruh internasionalnya dalam bidang politik, ekonomi dan diplomatik Rusia telah berusaha untuk mengimplementasikan beberapa perubahan dalam kebijakan - kebijakannya mau itu bersifat ranah domestik maupun internasional.³

¹ Borshchevskaya, Anna. "How the Death of the Soviet Union Transformed the Middle East." The Washington Institute, December 21, 2021. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-death-soviet-union-transformed-middle-east>.

² Nikitina, Yulia. "The 'Color Revolutions' and 'Arab Spring' in Russian Official Discourse." *Connections* 14, no. 1 (2014): 87-91. <http://www.jstor.org/stable/26326387>.

³ Mandelbaum, Michael. "Excerpt: The New Russian Foreign Policy," Council on Foreign Relations, accessed September 22, 2021, <https://www.cfr.org/excerpt-new-russian-foreign-policy>.

Prinsip - prinsip yang diterapkan oleh Rusia untuk mengembalikan status Rusia sebagai negara hegemon seperti yang dijanjikan oleh Menteri Luar Negeri Yevgeny Primakov pada tahun 1996 dulu. Pandangan dia terhadap implementasi paham multipolar, dimana Rusia akan berperan sebagai pusat kekuasaan dan pengaruh, dimana akan ada kemitraan global beragam dengan negara adidaya lainnya. Kebijakan ini diterima oleh politik Rusia yang waktu itu diperparah dengan kondisi anti sentimen terhadap pergerakan politik dan pemahaman Barat.⁴ Setelah diimplementasi, kebijakan ini kemudian dijadikan prioritas Rusia dalam rangka menguatkan kembali statusnya dengan memperhatikan beberapa aspek lainnya seperti perbaikan kondisi ekonomi dan sosial domestiknya.⁵ Salah satu tindakan Rusia dalam menegaskan kembali pengaruhnya terlihat dari keterlibatannya di kawasan Timur Tengah, kawasan ini menjadi salah satu fokus utama Rusia mengingat lokasinya yang berdekatan dengan negara - negara dari CIS (Commonwealth of Independent States). Perilaku asertif Rusia dalam kebijakan luar negerinya terlihat ketika melakukan intervensi non militer yang kemudian dilanjutkan secara militer dalam Perang sipil Suriah pada tahun 2011 yang sampai dengan sekarang masih berlangsung.⁶

Di tahun 2011, masa kritis dimana fenomena Arab Spring atau juga disebut Revolusi Arab sedang berlangsung, gerakan demonstrasi revolusioner dengan tujuan untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi dimulai oleh Tunisia yang kemudian menyebar ke negara - negara di kawasan Timur Tengah seperti Suriah,

⁴ Blank, Stephen., "The Foundations of Russian Policy in the Middle East," The Jamestown Foundation, Oktober 5, 2017, <https://jamestown.org/program/foundations-russian-policy-middle-east/>.

⁵ Baig, Ali Muhammad. "The Primakov Doctrine: Shaping Russian Foreign Policy," Daily Times, Juli 29, 2018, <https://dailytimes.com.pk/275202/the-primakov-doctrine-shaping-russian-foreign-policy/>.

⁶ *Ibid.*

Mesir, Libya, Bahrain dan lainnya. Berbagai keberhasilan terlihat seperti contohnya dimana Mesir dan Tunisia mengalami pergantian presiden, dari hasil tersebut beberapa negara - negara di kawasan Timur Tengah mencoba mengikuti langkah tersebut dan beberapa berakhir dengan kegagalan.⁷

Gerakan demonstrasi revolusioner ini juga memasuki Suriah pada tahun 2011, masyarakat Suriah pada saat itu melihat pemerintahan Bashar al - Assad sebagai rezim yang otoriter, hak aspirasi dan demokrasi rakyat terancam. Pada awalnya gerakan demonstrasi berjalan secara damai, namun seiring hari berjalan Bashar al - Assad menggunakan tindakan represif dengan pasukan pemerintahnya melakukan kekerasan dan bahkan membunuh para demonstran yang mengakibatkan gerakan kekerasan menyebar ke seluruh negara. Amarah rakyat Suriah tidak terpendam dan kemudian melakukan revolusi dan menyerukan aksi untuk menggulingkan pemerintahan Suriah.⁸ Tidak lama setelah itu, di banyak bagian dari Suriah banyak terjadi aksi pemberontakan bersenjata yang berujung kepada perang sipil Suriah.

Seiringnya berjalan perang sipil Suriah pada tahun 2011, pemerintahan Suriah tidak mampu mengendalikan konfliknya yang semakin lama semakin tidak terkendali dan kelompok pemberontak dan bersenjata seperti ISIS atau FSA (Free Syrian Army) semakin memenangkan pertempuran terhadap pasukan pemerintah.⁹ Di tengah kekacauan, kelompok ekstremis seperti ISIS dan Al - Qaeda juga turut

⁷ Staff, NPR. "The Arab Spring: A Year of Revolution." NPR, December 17, 2011. <https://www.npr.org/2011/12/17/143897126/the-arab-spring-a-year-of-revolution>.

⁸ Blakemore, Erin. "What Was the Arab Spring and What Caused It to Happen?," National Geographic, Mei 3, 2021, <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/arab-spring-cause>.

⁹ Yacoubian, Mona., "Syria Timeline: Since the Uprising Against Assad," United States Institute of Peace, March 12, 2021, <https://www.usip.org/syria-timeline-uprising-against-assad>.

berpartisipasi dalam perang sipil Suriah, dan ISIS bahkan sempat menduduki ibukota Suriah, Aleppo.

Melihat situasi yang genting, atas permintaan dari pemerintahan Suriah dan mengingat hubungan historis antara kedua negara tersebut sejak masa Uni - Soviet, Rusia kemudian melakukan intervensi militer di Suriah pada tahun 2015 yang kemudian mengubah keadaan bagi Suriah yang sebelumnya hampir mengalami kekalahan telak. Atas bantuan ini, Rusia dan Suriah berhasil mengalahkan kelompok oposisi dan mencegah kelompok ekstremis untuk berkembang biak di Suriah dan menyebarkan pengaruh radikalnya ke Rusia.¹⁰ Secara historis, pengerahan pasukan militer Rusia di Suriah merupakan pertama kalinya sejak berakhirnya perang dingin pada tahun 1991 dimana Rusia terlibat dalam perang yang berlokasi di luar perbatasan Rusia maupun perbatasan Uni - Soviet dahulu.¹¹

1.2 Identifikasi Masalah

Pada tanggal 30 September 2015, Rusia secara resmi mengerahkan pasukannya di Suriah untuk membantu pasukan Suriah dalam rangka melawan kelompok oposisi dan kelompok ekstremis lainnya yang sejak tahun 2011 melawan pemerintahan Bashar al - Assad. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 sebelum pasukan Rusia tiba, kelompok oposisi dan kelompok ekstremis lainnya sudah berhasil dalam melakukan operasi militernya secara ofensif yang mengakibatkan

¹⁰ "Syria Crisis: Russian Air Strikes against Assad Enemies." BBC News. BBC, September 30, 2015. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34399164>.

¹¹ Petkova, Mariya. "What Has Russia Gained from Five Years of Fighting in Syria?," Middle East | Al Jazeera (Al Jazeera, Oktober 1, 2020), <https://www.aljazeera.com/features/2020/10/1/what-has-russia-gained-from-five-years-of-fighting-in-syria>.

pemerintah Suriah kehilangan kendali atas beberapa provinsi strategis. Hal ini mengakibatkan pemerintah Suriah untuk melakukan tindakan defensif dan mempertahankan sisa dari wilayah teritorialnya, namun setelah intervensi militer dari Rusia datang, serangan ofensif oleh kelompok oposisi secara perlahan terhentikan dan mengubah arus perang tersebut yang mendukung pemerintah Suriah.¹²

Intervensi ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah dimana Rusia menerjunkan pasukannya di luar wilayah bekas Uni - Soviet, Rusia sebelumnya juga pernah menurunkan pasukannya dalam Perang Georgia pada tahun 2008 dan Aneksasi Krimea di Ukraina pada tahun 2014. Hal yang membuat intervensi ini sulit adalah karena Rusia menghadapi oposisi yang keras dimana kelompok pemberontak didukung oleh pihak eksternal seperti Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, dan Qatar.¹³

Kedua, banyak dari masyarakat Rusia tidak setuju dan bahkan menolak keputusan Vladimir Putin untuk mengirim pasukan Rusia ke Suriah dikarenakan sejarah masa lalu dimana hampir 15000 tentara Rusia meninggal dalam invasi di Afghanistan.¹⁴ Intervensi militer di Rusia juga menghabiskan dana yang sangat besar setiap harinya, sekitar \$4 Juta dihabiskan setiap harinya dan tercatat sampai dengan tahun 2016 Rusia telah menghabiskan sekitar \$460 Juta dalam intervensi militer di

¹² Daher, Joseph. "Three Years Later: The Evolution of Russia's Military Intervention in Syria," Atlantic Council, Agustus 16, 2019, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/three-years-later-the-evolution-of-russia-s-military-intervention-in-syria/>.

¹³ "What Foreign Powers Want from the Syrian War." Deutsche Welle, April 12, 2018. <https://www.dw.com/en/what-foreign-powers-want-from-the-syrian-war/a-42686306>.

¹⁴ Volkov, Denis. "Do Russians Support Putin's War in Syria?" Carnegie Endowment for International Peace, October 12, 2015. <https://carnegiemoscow.org/commentary/61583>.

Suriah.¹⁵ Pasca aneksasi Krimea, Rusia telah dibombardir sanksi internasional oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara - negara lainnya yang mengakibatkan kondisi perekonomian Rusia terpuruk dan mengalami resesi.

Hubungan Rusia dan negara - negara di kawasan Timur Tengah menjadi tegang akibat tindakan Rusia dalam melakukan intervensi militer, kerjasama Rusia dengan Turki dan Arab Saudi terhambat akibat perbedaan pandangan dalam tindakan Rusia.¹⁶ Dilema yang dialami Rusia dalam melakukan intervensi militer di Suriah sangatlah besar, hubungan kerjasama yang dengan negara - negara di kawasan Timur Tengah terhambat, namun di sisi lainnya jika Rusia tidak melakukan intervensi militer di Suriah maka Rusia beresiko untuk kehilangan salah satu sekutunya di kawasan Timur Tengah beserta aset - aset yang dimiliki Rusia di Suriah.¹⁷ Jatuhnya Suriah juga akan mengakibatkan beberapa implikasi - implikasi lainnya yang ditakuti Rusia seperti menyebarnya kelompok - kelompok ekstremis di kawasan Timur Tengah yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi masyarakat Muslim di Rusia.

Menghadapi oposisi yang kuat dari pihak domestik dan internasional, Rusia tetap menyakinkan dunia internasional sekali lagi bahwa Rusia tidak segan untuk menggunakan kekuatannya untuk melakukan intervensi atau tindakan yang semacamnya untuk melindungi sekutunya dan kepentingan nasionalnya di luar negeri, dan hal tersebut terlihat keberhasilan Rusia di Suriah.¹⁸

¹⁵ "Russia's Syria Operation Cost over \$460 Million." TASS, March 17, 2016. <https://tass.com/politics/863079>.

¹⁶ "Russia's Syrian Intervention Could Hurt Its Economy." Anadolu Ajansı, October 9, 2015. <https://www.aa.com.tr/en/analysis-news/russias-syrian-intervention-could-hurt-its-economy/437069>.

¹⁷ Yacoubian, Mona. "What Is Russia's Endgame in Syria?," United States Institute of Peace, February 17, 2021, <https://www.usip.org/publications/2021/02/what-russias-endgame-syria>.

¹⁸ Fischer, Sabin. "Dimensions and Trajectories of Russian Foreign Policy," *Istituto Affari Internazionali*, no. 20 (April 27, 2020): pp. 7-8, <https://doi.org/978-88-9368-128-5>.

1.21 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan pada pemenuhan kebijakan luar negeri Rusia di Suriah dari tanggal 30 September 2015 sampai dengan tahun 2021, dengan Rusia sebagai aktor utama dalam intervensi militer tersebut. Tanggal 30 September 2015 dipilih dikarenakan tanggal tersebut merupakan tanggal resmi dimana pemerintah Rusia melakukan intervensi militernya di Perang sipil Suriah, mengingat perang sipil Suriah masih berlangsung, maka tahun 2021 dipilih sebagai bentuk pembatasan masa penelitian terhadap permasalahan diatas. Kedua, penelitian ini juga akan meneliti kepentingan nasional kebijakan luar negeri Rusia dalam konteks kepentingan nasional yang terkait dengan tindakan intervensi militer Rusia di perang sipil Suriah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab di dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia dalam Intervensi Militer di Perang Sipil Suriah Memenuhi Kepentingan Nasional Federasi Rusia dalam Ranah Domestik dan Internasional”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai kepentingan nasional Federasi Rusia dalam ranah domestik dan internasional dalam kebijakan luar negeri Federasi Rusia dalam melakukan intervensi militer di Perang sipil Suriah pada tahun 2015 - 2021.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberi informasi yang mendalam dan detail yang diharapkan akan membantu penulis dan pembaca untuk memperluas pemahaman dan pengetahuannya mengenai perang sipil di Suriah serta tujuan Rusia untuk melakukan intervensi militer di perang sipil tersebut dari perspektif kebijakan luar negeri yang memuat kepentingan nasional Rusia dalam ranah pertimbangan domestik dan internasional.

1.4 Kajian Literatur

Pada bagian ini, penulis akan menggunakan beberapa literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Literatur yang digunakan merupakan hasil penelitian yang kemudian akan digunakan oleh penulis untuk membantu menjawab perdebatan mengenai alasan mengapa Rusia melakukan intervensi militer di perang sipil Suriah dari segi kebijakan luar negeri, secara spesifik bagaimana Rusia memenuhi

kepentingan domestik dan internasionalnya. Julia Gurganus dan Eugene Rumer dalam jurnal *Russia's Global Ambitions in Perspective* memperlihatkan pandangan Rusia terutama kebijakan luar negeri Rusia dibawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Pasca keruntuhan Uni - Soviet, Rusia ingin kembali dalam politik internasional dengan memperbaharui kebijakan luar negerinya yang bersifat multipolar, keinginan Rusia untuk menjadi sebuah negara *great power* memperluas ambisi geopolitik Rusia ke wilayah - wilayah yang sebelumnya Uni - Soviet pernah sangat berpengaruh. Dalam rangka melakukan ini, Rusia mampu dan akan mengerahkan seluruh sumber daya ekonomi, pengaruh politik dan kekuatan militer yang dimiliki dengan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya.¹⁹

Aron Lund dalam tulisannya yang berjudul *Russia in the Middle East* menjelaskan tentang kepentingan - kepentingan Rusia di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara di Timur Tengah seperti Mesir, Iran, Suriah, Turki, Afghanistan merupakan negara - negara dimana Rusia memiliki hubungan yang baik. Selain memiliki hubungan yang baik, Rusia juga menaruh banyak investasi ke dalam negara - negara tersebut dan terlibat dalam kerjasama dalam bidang ekonomi, keamanan dan lainnya. Pasca peristiwa Arab Spring, perhatian Rusia terhadap kawasan Timur Tengah meningkat secara drastis, sikap pragmatis yang diambil oleh Rusia untuk menghadapi fenomena *regime change* memberikan impresi dalam politik internasional bahwa Rusia mendukung pemerintahan negara yang sah dan bukan pemerintahan hasil penggulingan yang dibantu oleh negara - negara Barat.²⁰

¹⁹ Gurganus, Julia and Eugene Rumer. "Russia's Global Ambitions in Perspective," *Carnegie Endowment for International Peace*, 2019

²⁰ Lund, Aron. "Russia in the Middle East," *The Swedish Institute of Foreign Affairs*, February 2019.

Sementara jurnal yang juga ditulis oleh Aron Lund yang berjudul *From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations* menyatakan bahwa dalam kawasan Timur Tengah, Rusia menaruh prioritas dan perhatian yang besar secara khusus terhadap Suriah. Dijelaskan bahwa Rusia memiliki kepentingan militer dan ekonomi di Suriah. Kepentingan militer yang dimaksud adalah pangkalan laut di Tartus dan pangkalan udara di Khmeimim. Dalam kepentingan ekonomi, Rusia dan Suriah banyak melakukan kerjasama dalam sektor migas, ekspor persenjataan, dan investasi - investasi perusahaan Rusia di Suriah. Aron Lund mengatakan bahwa selain memiliki kepentingan - kepentingan ini, pemerintahan Bashar al - Assad juga ingin melawan kelompok teroris yang menjadi salah satu kekhawatiran Rusia.²¹

Terakhir dalam jurnal Samuel Charap, Elina Treyger dan Edward Geist dengan judul *Understanding Russia's Intervention in Syria* menyatakan bahwa Rusia melakukan intervensi militer di perang sipil Suriah pada tahun 2015 disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu faktor politik, geopolitik, dan militer. Rusia melihat bahwa jatuhnya pemerintahan Bashar al - Assad akan membawa dampak buruk seperti kehilangan kepentingan dan munculnya kelompok teroris seperti ISIS. Melihat dalang kelompok pemberontak yang didanai oleh Amerika Serikat, Rusia melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan manuver dengan upaya diplomasi dan kemudian tindakan intervensi dengan harapan bahwa Rusia bisa meningkatkan pengaruhnya geopolitiknya di kawasan Timur Tengah.

Empat literatur diatas merupakan pedoman yang akan digunakan oleh penulis dalam upaya untuk menulis penelitian ini. Setiap literatur memiliki

²¹ Lund, Aron. "From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations," *The Swedish Institute of Foreign Affairs*, July 2019

pembahasan dan topik yang berbeda namun bisa ditarik kesimpulan bahwa keempat literatur tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Rusia melakukan perubahan dalam kebijakan luar negerinya, keputusan dan tindakan yang Rusia lakukan di kawasan Timur Tengah terutama Suriah merupakan salah satu hasil dari perubahan kebijakan luar negeri Rusia tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Realisme

Dalam upaya penulis untuk menemukan jawaban yang dicari dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Realisme sebagai Grand Theory dalam jajaran teori dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Realisme Klasik diutarakan oleh Hans. J. Morgenthau mengatakan bahwa realisme bermain peran dalam sebuah negara atau *nation state* adalah aktor utama, aktor selain itu seperti individu atau organisasi internasional mempunyai juga mempunyai peran namun terbatas dalam kekuatannya.²² Asumsi kedua adalah kepentingan nasional merupakan perangkat utama yang menyatukan sebuah negara dalam satu suara, terutama dalam masa perang atau darurat. Asumsi ketiga pengambil keputusan dalam suatu negara adalah aktor rasional, rasional dalam hal ini didefinisikan dengan mengambil keputusan yang ditujukan dalam ranah kepentingan nasional. Asumsi keempat yaitu negara selalu hidup dalam anarki, sistem internasional yang berlaku tidak akan membantu

²² Hadiwinata, Bob S. Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. Pp 102-103.

negara dan pada akhirnya negara hanya bisa mengandalkan diri sendirinya (*self help*).²³

Hans. J. Morgenthau sendiri berpendapat bahwa Realisme melihat kebijakan luar negeri dari kepentingan nasional sebuah negara, dan dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut suatu negara akan menggunakan *national power* atau kekuatan militernya untuk melaksanakan kebijakan luar negeri tersebut untuk mengamankan kepentingan nasional tersebut.²⁴ Norma – norma moral tidak berlaku terhadap keputusan kebijakan tersebut karena kepentingan nasional merupakan prioritas utama, kekuatan negara merupakan aspirasi suatu negara dan setiap negara melaksanakan kebijakan luar negeri atas kesadaran sendirinya, keinginan dan kemauan suatu negara juga menjadikan kebijakan luar negeri tersebut sebagai tujuan utama suatu negara dalam politik internasional.²⁵

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Selain itu, penulis juga menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy*, secara dasar konsep ini merupakan seperangkat tindakan - tindakan atau aturan yang digunakan oleh suatu negara berotoritas untuk mengatur tindakan politiknya secara independen di lingkungan internasional.²⁶ Konsep dasar dari kebijakan luar negeri sendiri menganut pemahaman sebagai tindakan yang *action driven*, segala tindakan yang dilakukan karena sebab dan akibat yang terjadi di luar

²³ McGlinchey, Stephen, Christian Scheinflug, and Rosie Walters. "Realism," in *International Relations Theory* (Bristol: E-International relations, 2017), pp. 15-16.

²⁴ Gellman, Peter. "Hans J. Morgenthau and the Legacy of Political Realism." *Review of International Studies* 14, no. 4 (1988): 252–256. <http://www.jstor.org/stable/20097151>.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Morin Jean-Frédéric and Jonathan Paquin. *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* (Palgrave Macmillan, 2018). pp 4-5.

negeri, hal ini bisa dihubungkan dengan faktor geografis dikarenakan kebijakan luar negeri akan melakukan tindakan di luar perbatasan negaranya terlepas dari instansi

Kebijakan luar negeri pun dibagi menjadi dua bagian berbeda yang mengusung esensi dalam menentukan arah di ranah internasional yaitu: mengamankan kepentingan nasional (*national interest*) dan menjunjung tinggi ideologi bangsa (*national ideology*). Kepentingan nasional sendiri merupakan salah satu gagasan utama dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri, dan hal tersebut yang bisa melegitimasi suatu kebijakan luar negeri.²⁷ Menurut David Callahan, kepentingan nasional adalah sebuah “kebutuhan” dan “keinginan” suatu negara. Kebutuhan negara secara esensial adalah kepentingan vital yang menjamin perlindungan dan keberlangsungan negara tersebut secara nasional maupun internasional, contoh dari kepentingan vital ini adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi perekonomian, dan wilayah teritorial negara tersebut. Keinginan negara merujuk terhadap keinginan suatu negara yang tidak berdampak secara langsung terhadap kondisi keamanan negara tersebut, contoh dari keinginan ini adalah seperti mempromosikan kebudayaan lokal negara tersebut di dunia internasional.²⁸

Dari kedua bagian yang berbeda, kebijakan luar negeri pada umumnya memiliki tiga tujuan utama yaitu: tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang.²⁹ Tujuan jangka pendek bisa didefinisikan sebagai tujuan inti, dimana nilai - nilai inti, kepentingan keintegritasan nasional dan kemerdekaan

²⁷ *Ibid.* 23-24

²⁸ *Ibid*

²⁹ Ahmed, Jesmine. “The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations - An Analysis,” *Journal of Critical Reviews* 7, no. 02 (April 1, 2020): p. 787
<https://doi.org/10.31838/jcr.07.02.144>.

negara menjadi prioritas utama. Pada tujuan ini, negara harus bisa bertindak dengan kehendaknya sendiri tanpa kompromi.³⁰ Tujuan jangka menengah berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam hal kemajuan ekonomi dan peningkatan standar hidup seperti perdagangan ekonomi dan bantuan luar negeri. Kemakmuran ekonomi merupakan salah satu faktor penentu yang kritis dalam politik internasional karena negara yang mempunyai status ekonomi yang bagus dan stabil cenderung memiliki peran politik yang lebih tegas dan berpengaruh dalam membuat keputusan.³¹ Tujuan jangka panjang menyangkut tentang keberlangsungan negara tersebut seperti rencana masa depan, visi dan misi mengenai sistem ideologi suatu negara yang akan digunakan dalam ranah internasional.³²

Dalam memformulasikan kebijakan luar negeri, ada tiga proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu dari *input*, *decision making process*, dan *output*. Faktor *input* merupakan pemicu terhadap proses awal pembuatan suatu kebijakan luar negeri, pemicu tersebut bisa berupa hal - hal atau kejadian yang bersifat domestik maupun internasional yang membutuhkan atau memaksakan adanya tanggapan terhadap kebijakan luar negeri suatu negara.³³ Faktor *decision making process* merupakan proses dimana negara, pemerintah maupun individu merancang kebijakan luar negeri negara tersebut dan berbagai diskusi dilakukan bagaimana kebijakan luar negeri tersebut dapat dilaksanakan. Faktor *output* merupakan tanggapan dari pembuatan kebijakan luar negeri tersebut, bagaimana kebijakan luar negeri tersebut mempengaruhi keadaan domestik negara tersebut dan bagaimana

³⁰ *Ibid.* 788.

³¹ *Ibid.* 788.

³² *Ibid.* 788.

³³ Brecher, Michael, Blema Steinberg, and Janice Stein. "A Framework for Research on Foreign Policy Behavior." *The Journal of Conflict Resolution* 13, no. 1 (1969): 78. <http://www.jstor.org/stable/173299>.

kebijakan luar negeri tersebut mempengaruhi dunia internasional secara keseluruhan.³⁴

Menurut James N. Rosenau, dalam fase *input* terdapat empat pemicu yang disebut sebagai *external behaviours* yang mengubah perilaku pemerintah dalam pembuatan kebijakan luar negeri yaitu teritori, status negara, sumber daya manusia, dan sumber daya non - manusia. Keempat pemicu tersebut mempengaruhi lima variabel yang menyebabkan perubahan perilaku pemerintah dalam pembuatan sebuah kebijakan luar negeri. Lima variabel tersebut merupakan variabel individu, peran, pemerintah, masyarakat dan sistemik.³⁵ Variabel individu merupakan karakteristik unik yang dimiliki oleh pembuat keputusan tersebut, nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya – yang membedakan pilihan atau perilaku kebijakan luar negerinya dari setiap pembuat keputusan lainnya.³⁶ Variabel peran berkaitan dengan jabatan atau peran yang mereka tempati dan kemungkinan akan terjadi terlepas dari karakteristik individu dari pengguna peran tersebut.³⁷ Variabel pemerintah mengacu terhadap aspek - aspek struktur pemerintah yang membatasi atau meningkatkan pilihan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pengambil keputusan.³⁸ Variabel masyarakat merupakan aspek-aspek non-pemerintah dari suatu masyarakat yang mempengaruhi perilaku eksternalnya, orientasi nilai utama suatu masyarakat, tingkat persatuan nasionalnya, dan tingkat industrialisasinya hanyalah beberapa dari variabel-variabel sosial yang dapat berkontribusi pada isi dari suatu bangsa. aspirasi

³⁴ *Ibid.* 79.

³⁵ Rosenau, James N. "Pre-Theories and Theories of Foreign Policy." Essay. In *The Study of World Politics* 1, 1:171–172. Routledge, 2006.

³⁶ *Ibid.* 172.

³⁷ *Ibid.* 173.

³⁸ *Ibid.* 173.

dan kebijakan eksternal.³⁹ Variabel sistemik mencakup aspek non-manusia dari lingkungan eksternal masyarakat atau tindakan apa pun yang terjadi di luar negeri yang kondisi atau memengaruhi pilihan yang dibuat oleh pejabatnya.⁴⁰

Dalam fase *process*, James N. Rosenau mengutarakan tiga model dari *decision making process* yaitu *bureaucratic politics*, *group dynamics* dan *individual decision making*.⁴¹ Model *bureaucratic politics* adalah proses keputusan yang dilakukan dari hasil negosiasi dengan antar aktor pemerintahan. Karena proses negosiasi ini dilakukan antar aktor - aktor pemerintahan yang memiliki hierarki yang sama, kemungkinan akan hasil keputusan yang dibuat untuk tidak optimal sangat memungkinkan dikarenakan setiap aktor - aktor pemerintahan menginginkan kebijakan yang menguntungkan bagi organisasi mereka dibandingkan dengan kebijakan luar negeri yang bersifat nasional.⁴²

Model *group dynamics* adalah proses keputusan yang dilakukan dalam diskusi yang dijalankan secara kelompok. Kelompok yang melakukan negosiasi dan keputusan merupakan kumpulan kelompok - kelompok elit dan penasehatnya. Setiap kelompok memiliki dinamikanya masing - masing yang kemudian akan mempengaruhi cara setiap kelompok melaksanakan tugasnya.⁴³

Model *individual decision making* adalah proses keputusan yang dilakukan secara tersendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya. Keputusan yang dilakukan ini biasanya melibatkan rasionalitas yang tidak dipengaruhi oleh

³⁹ *Ibid.* 173.

⁴⁰ *Ibid.* 173.

⁴¹ *Ibid.* 222-223.

⁴² *Ibid.* 223.

⁴³ *Ibid.* 223.

keinginan pihak atau organisasi lainnya, keputusan akhir yang akan dilakukan akan sangat dipengaruhi oleh sifat individu tersebut.⁴⁴

Dalam fase output, James N. Rosenau mengatakan bahwa dalam *issue area* terdiri dari tiga gagasan, gagasan pertama mengatakan bahwa kebijakan luar negeri digunakan sebagai gagasan untuk arah orientasi negara, gagasan kedua yaitu kebijakan luar negeri digunakan sebagai seperangkat komitmen dan perencanaan untuk tindakan negara, dan gagasan ketiga yaitu kebijakan luar negeri digunakan sebagai arah berperilaku negara.⁴⁵

Gagasan kebijakan luar negeri digunakan sebagai arah orientasi negara. Hal ini mengacu pada sikap, persepsi, dan nilai, dan semua ini berasal dari pengalaman sejarah negara dan keadaan strategis yang menandai tempatnya dalam politik dunia. Gagasan orientasi negara berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara negara ketika dihadapkan pada kondisi eksternal yang mengharuskan mereka mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Hal ini merupakan kecenderungan dan prinsip umum yang mendasari perilaku negara di arena politik internasional.⁴⁶

Gagasan kebijakan luar negeri digunakan sebagai seperangkat komitmen dan perencanaan untuk tindakan negara yang mengacu pada pengungkapan strategi, keputusan dan kebijakan yang dapat diamati yang dilakukan ketika negara terhubung dengan lingkungan eksternalnya. Sebagian besar dari komitmen dan perencanaan ini dapat diamati dan terdiri dari tujuan dan sarana khusus untuk mencapainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komitmen dan perencanaan

⁴⁴ *Ibid.* 223.

⁴⁵ *Ibid.* 192.

⁴⁶

tindakan negara merupakan penjabaran dari gugusan orientasi, yang dibuat ketika pengamat atau analis mengacu pada pembuatan kebijakan luar negeri.

Gagasan kebijakan luar negeri digunakan sebagai arah berperilaku negara merujuk pada fase empirisnya yang melibatkan langkah-langkah konkrit atau kegiatan yang mengikuti penjabaran orientasi umum kebijakan luar negeri yang memperlihatkan perilaku eksternal negara.⁴⁷

Konsep Intervensi

Kedua, penulis akan menggunakan konsep intervensi militer, intervensi militer menurut Frederic S. Pearson didefinisikan sebagai gerakan pasukan atau kekuatan militer oleh satu negara atau sekelompok negara dengan melintasi perbatasan negara berdaulat lainnya, atau tindakan militer oleh pasukan yang sudah dipersiapkan di negara - negara yang menjadi target intervensi. Intervensi militer ditujukan pada struktur otoritatif yang mengganggu hubungan yang dinormalisasi, intervensi militer dirancang dan dirancang sedemikian rupa untuk memaksa perubahan di negara-negara yang menjadi target intervensi.⁴⁸

Intervensi militer bisa disebabkan oleh dua penyebab yaitu: Pertama adalah sifat negara, apakah pemerintahan negara tersebut merupakan negara musuh, negara netral atau negara bersahabat. Apakah dukungan intervensi militer dilakukan terhadap pemerintahan negara tersebut berlawanan dengan suatu kelompok oposisi atau terhadap kelompok oposisi yang sedang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan negara tersebut. Kedua, adalah kondisi politik dari negara tersebut,

47

⁴⁸ Pearson, Frederic S. "Foreign Military Interventions and Domestic Disputes." *International Studies Quarterly* 18, no. 3 (1974): 4. <https://doi.org/10.2307/2600156>.

apakah intervensi militer dilakukan dalam perselisihan domestik di negara tersebut, atau intervensi militer dilakukan terhadap pihak yang melakukan intervensi tidak secara jelas mendukung satu pihak dalam perselisihan domestik atau di mana pergerakan pasukan memiliki implikasi terhadap kebijakan luar negeri atau domestik target untuk kondisi tertentu di negara tersebut dengan tidak adanya atau terlepas dari perselisihan domestik.⁴⁹

Ada empat faktor di mana intervensi militer dapat dikaitkan dengan konflik domestik, faktor-faktor ini terkait dalam pencarian penyebab, kontrol dan konsekuensi intervensi. Keempat faktor ini pun dibagi dengan dua bagian yaitu bagian pertama dimana konflik domestik dapat mendahului intervensi militer dan bagian kedua dimana konflik luar negeri dapat mendahului konflik domestik. Untuk bagian pertama, faktor penyebab pertama adalah konflik domestik di satu negara dapat menarik minat pemimpin negara lain dan menyebabkan mereka untuk mengirim pasukan ke negara yang mengalami konflik domestik. Kedua, konflik domestik dalam suatu negara dapat menyebabkan para pemimpinnya mencari pengalihan konflik eksternal dan mengirim pasukan ke luar negeri. Untuk bagian kedua, faktor penyebab pertama adalah pasukan yang ditempatkan di negara asing dapat menyebabkan gangguan dan konflik di negara tersebut, karena ada kemungkinan penduduk lokal membenci pasukan asing. Kedua, jika pasukan terlibat dalam penugasan yang lama di luar negeri, masyarakat dalam negeri bisa dapat terpecah belah.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* 5

⁵⁰ *Ibid.* 6-7.

Konsep Konflik Internal

Melanjutkan sebelumnya, teori konflik khususnya konflik internal seperti perang sipil menjelaskan bahwa konflik sendiri merupakan suatu bentuk persaingan yang terjadi antara individu atau kelompok, masing - masing dengan ide, kepercayaan, ideologi, agama, tujuan dan targetnya tersendiri. Faktor - faktor ini yang merupakan akar permasalahan dari pembagian individu maupun kelompok ini, hasil dari negosiasi dan konsesi akhir dari faktor - faktor permasalahan ini yang kemudian akan mendeterminasikan hasil dari konflik tersebut, apakah konflik tersebut akan mengeskalasi menjadi kekerasan atau perdamaian.⁵¹

Konflik internal merupakan konflik yang sebagian besar dipicu oleh perebutan kekuasaan dimana kelompok - kelompok dominan seperti kelompok etnis, agama, maupun politik berusaha untuk merebut kendali pemerintahan negara tersebut yang dianggap melakukan penindasan terhadap mereka. Selain itu, konflik internal juga bisa dipicu oleh permasalahan domestik seperti permasalahan sosial maupun ekonomi yang kerap terjadi di negara - negara manapun.⁵² Seperti yang sudah disebut diatas, konflik internal bisa berakhir dengan kekerasan atau perdamaian, tidak lazim jika konflik internal berakhir dengan kekerasan maka kekerasan tersebut bisa berupa konflik etnis, genosida, perang sipil, kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Michael. E Brown, konflik internal disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor struktural, faktor politik, faktor ekonomi dan sosial, dan faktor

⁵¹ Lake, David A. "International Relations Theory and Internal Conflict: Insights from the Interstices." *International Studies Review* 5, no. 4 (2003): 82-83. <http://www.jstor.org/stable/3186395>.

⁵² David, Steven R. Review of *Internal War: Causes and Cures*, by Michael Brown and Roy Licklider. *World Politics* 49, no. 4 (1997): 553. <http://www.jstor.org/stable/25054019>.

kebudayaan dan persepsi.⁵³ Faktor struktural menjelaskan adanya tiga penyebab konflik internal yaitu: negara yang lemah, perbedaan kepentingan antar wilayah negara, dan persebaran perbedaan etnis. Sistem pemerintahan negara harus siap dengan permasalahan internal maupun eksternal negara, selain dengan kesiapan tersebut pemerintahan negara tersebut harus sah dan diterima oleh masyarakat. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka akan beresiko untuk terjadi perpecahan kelompok - kelompok masyarakat, hal ini bisa menyebabkan kekhawatiran dan kecurigaan dalam ranah masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat untuk mencari cara untuk mendapatkan perlindungan dengan cara apapun, salah satunya adalah untuk bergabung dengan kelompok - kelompok etnis masing - masing. Penggabungan kelompok ini bisa menyebabkan munculnya kembali kebencian antar etnis, perseteruan - perseteruan lama dan konflik identitas.⁵⁴

Faktor politik menekankan terhadap cara sistem pemerintahan melakukan pemerintahan di negara tersebut. Sistem otoriter terutama merupakan salah satu sistem pemerintahan yang rentan terhadap konflik internal dikarenakan sistem pemerintahan otoriter identik dengan negara yang represif dan sering mengabaikan kepentingan - kepentingan masyarakat terutama masyarakat minoritas. Namun hal tersebut bisa terjadi dalam sistem pemerintahan demokrasi, dimana pentingnya perwakilan akan suatu kelompok etnis dalam institusi negara seperti kepolisian, militer, dan partai politik. Ketiadaan perwakilan ini menyebabkan diskriminasi etnis dan ras sehingga menyebabkan destabilisasi politik, elit politik yang notabene juga berpengaruh dalam sistem pemerintahan juga seringkali memanfaatkan situasi atau

⁵³Brown, Michael Edward. *The International Dimensions of Internal Conflict*. United Kingdom: MIT Press, 1996: 13.

⁵⁴*Ibid.* 15

momen - momen tertentu untuk melakukan tindakan yang memberikan mereka keuntungan pribadi.⁵⁵

Faktor ekonomi dan sosial menjelaskan bahwa permasalahan perekonomian negara bisa menyebabkan konflik internal, isu pengangguran bisa menguatkan isu diskriminasi ekonomi terutama dalam permasalahan kesenjangan ekonomi antara kelas bawah, menengah dan atas. Pembangunan ekonomi dan upaya modernisasi yang tidak merata juga bisa menyebabkan konflik internal dikarenakan ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan tahap - tahap tersebut dengan fase yang diinginkan masyarakat, sementara pemerintah sendiri berjuang agar pembangunan ekonomi dan upaya modernisasi tersebut tidak membebani sistem politik dan ekonomi.⁵⁶

Terakhir, memasuki faktor kebudayaan dan persepsi, tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok etnis mayoritas terhadap etnis minoritas sehingga kelompok etnis minoritas seringkali tidak mendapatkan akses terhadap edukasi, pembatasan akses terhadap hak politik dan hukum serta larangan akan ajaran keagamaan dan kebudayaan etnis minoritas juga menjadi salah satu faktor penyebab konflik internal. Akibatnya, hal tersebut menumbuhkan kebencian dan ketidaksukaan antar etnis sehingga sentimen yang dikumpulkan turun - temurun.⁵⁷

Melihat keempat faktor ini secara keseluruhan, semua hal ini bisa dihentikan dengan adanya tindakan pemerintah yang bersikap adil, efektif dan bertoleran terhadap isu - isu yang kian muncul di suatu negara. Permasalahan ini yang disebut “*bad leader*” menekankan bahwa konflik internal disebabkan oleh kelalaian dan

⁵⁵ *Ibid.* 17.

⁵⁶ *Ibid.* 20.

⁵⁷ *Ibid.* 22.

kesengajaan oleh pemimpin negara dan pemerintahannya. Pemimpin negara dan pemerintahannya membuat kebijakan - kebijakan yang hanya memuaskan sebagian besar masyarakat dengan tujuan untuk tetap berkuasa.⁵⁸ Permasalahan “*bad neighbour*” muncul ketika konflik internal negara tersebut melibatkan negara - negara asing juga memainkan peran. Konflik internal seringkali menyebar ke negara - negara tetangga dengan membawa permasalahannya seperti pencari suaka, imigran, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi.⁵⁹

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan elemen deskriptif yaitu berupa pemaparan hasil data yang didapatkan dari mengumpulkan data, menganalisa data dan kemudian menginterpretasi data.⁶⁰ Hasil dari pengolahan data tersebut kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat oleh penulis.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka dan studi dokumen. Menggunakan data yang tersedia di dalam

⁵⁸ *Ibid.* 23.

⁵⁹ *Ibid.* 25

⁶⁰ Creswell W, John. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* Third Edition (California: Sage Publications, 2009), hal. 162.

buku, dokumen resmi, jurnal, atau data lainnya yang kemudian akan dikumpulkan oleh penulis untuk dilakukan penelitian berdasarkan keperluan peneliti dalam upaya menjawab masalah penelitian tersebut.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur yang terisi oleh jurnal - jurnal, kajian literatur yang berisi teori dan konsep, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan yang kemudian akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: Intervensi Militer Federasi Rusia di Perang Sipil Suriah

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi perang sipil Suriah sebelum Rusia melakukan intervensi secara militer dan setelah Rusia melakukan intervensi secara militer.

BAB III: Intervensi Militer Sebagai Pemenuhan Kepentingan Domestik dan Internasional Federasi Rusia

Bab ini merupakan analisa mengenai kebijakan luar negeri Rusia di Suriah. Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Rusia secara umum dan kemudian kebijakan luar negeri Rusia secara spesifik di

kawasan Timur Tengah. Setelah itu, akan dijelaskan bagaimana Rusia memenuhi kepentingan nasional domestik dan internasional Rusia dalam intervensi militer di perang sipil Suriah.

BAB IV: Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian terakhir dan akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan pemaparan dari bab - bab sebelumnya, bab ini juga akan memuat jawaban dari pertanyaan penelitian bagian rumusan masalah di bab sebelumnya.